



POLICY BRIEF



Menuju *Wellbeing* dan *Safety Culture* Bagi Kesehatan Mental Rescuer

Membangun Sistem Monitoring Wellbeing Rescuer Berbasis Data Untuk Kesiapsiagaan Personel, Pengelolaan Risiko Psikososial, dan Keselamatan Operasi SAR

Andriansyah, S.Pd., M.Si
(Analisis Kebijakan Ahli Muda - BASARNAS)
Narita Mayasari, S.Kom., M.M
(Penata Laksana Barang Penyelia - BASARNAS)

Ditujukan kepada :

- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
- Kementerian Kesehatan
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Pemerintah Daerah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Profesi *rescuer* dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) menghadapi risiko keselamatan fisik dan psikososial yang tinggi sehingga kondisi kesejahteraan fisik dan mental serta budaya keselamatan menjadi faktor penting dalam menjaga kesiapsiagaan, kualitas pengambilan keputusan, dan keselamatan operasi SAR. Namun, pengelolaan *wellbeing* di Basarnas belum terintegrasi dalam sistem manajemen operasi SAR, yang ditandai dengan paparan trauma berulang, belum tersedianya *Fatigue Risk Management System (FRMS)*, budaya organisasi yang belum sensitif terhadap masalah psikologis, serta belum adanya sistem monitoring *wellbeing* yang berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kelelahan operasional, *human error*, dan menurunkan efektivitas layanan SAR. Petunjuk teknis tentang pemeliharaan kesehatan tenaga pencarian dan pertolongan belum menjawab permasalahan yang terjadi. Diperlukan strategi mitigasi *wellbeing* dan *safety culture* bagi kesehatan mental *rescuer* seluruh Indonesia untuk menjamin pelaksanaan operasi SAR yang aman, cepat, tepat dan selamat.

PENDAHULUAN

Tingkat kejadian bencana, kecelakaan transportasi, dan kondisi membahayakan manusia yang terjadi di Indonesia termasuk kategori tinggi di dunia. Berdasarkan Aplikasi *Quick Response SAR*, jumlah operasi SAR periode 2021–2025 meningkat rata-rata sekitar 6% per tahun dan mencapai 2.766 operasi pada tahun 2025.

TREN KENAIKAN OPERASI SAR NASIONAL (2021-2025)



Peningkatan intensitas operasi SAR tersebut berdampak pada tingginya tuntutan fisik dan psikologis *rescuer* dalam tugas pencarian dan pertolongan. Kondisi itu tercermin pada kesehatan mental masing-masing personel. Setiawan et al. (2024), menemukan 49% *rescuer* Kantor SAR Yogyakarta memiliki kecenderungan gangguan kesehatan mental dan 5% masuk kategori gangguan psikologis. Sementara Hayati (2025), melaporkan 81,6% personel Kantor SAR Makassar mengalami *burnout* ringan yang berpotensi mempengaruhi konsentrasi, produktivitas, dan kualitas pengambilan keputusan di lapangan. Basarnas telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pemeliharaan Kesehatan Tenaga SAR Nomor 2 Tahun 2026 yang mengatur skrining kesehatan jiwa, konseling, dan pemeriksaan berkala. Namun, intervensi masih berfokus deteksi dan penanganan individu belum menyasar ke faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi kesehatan mental personel, seperti beban operasi SAR, manajemen kelelahan, dukungan psikososial, budaya keselamatan, dan sistem pemantauan berkelanjutan.

Jika tidak ditangani secara lebih komprehensif, kondisi ini berisiko menurunkan kesiapsiagaan personel, meningkatkan *human error*, dan melemahkan efektivitas operasi SAR. Oleh karena itu, diperlukan integrasi *wellbeing* dan *safety culture* dalam manajemen operasi SAR secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

PERMASALAHAN

1. Paparan Trauma Berulang (Repeated Traumatic Exposure)

Rescuer sering melaksanakan operasi SAR pada kasus dengan jumlah korban yang banyak dari berbagai macam kondisi (*mass casualty incident*) sehingga membutuhkan kompetensi kecepatan dan ketepatan dalam pemilihan korban. Kegagalan penyelamatan (*unsuccessful rescue*) dapat menimbulkan *moral injury* dan perasaan bersalah. Selain itu, *rescuer* sering berinteraksi dengan keluarga korban yang mengalami tekanan emosional tinggi. Hal ini memicu kondisi *acute stress reaction*, *post-traumatic stress disorder (PTSD)*, *emotional numbing*, dan *secondary traumatic stress (STS)* (Brooks et al., 2020). Sancaya et al. (2023) menemukan bahwa 59,4% *rescuer* Kantor SAR Jakarta mengalami STS dan Hapsari et al. (2025) melaporkan prevalensi PTSD sebesar 16% dengan gejala *hyper-arousal*. Temuan ini menunjukkan prevalensi STS dan PTSD lebih tinggi dibandingkan populasi umum.

2. Belum Tersedia Fatigue Risk Management System (FRMS)

Pra Operasi SAR, *rescuer* melaksanakan siaga rutin dalam 1 shift (12 jam) sebagaimana diatur dalam Peraturan Basarnas Nomor 5 Tahun 2025. Sedangkan pada saat operasi SAR, sesuai Peraturan Basarnas Nomor 3 Tahun 2020 pelaksanaan operasi SAR dapat berlangsung selama tujuh hari atau lebih. Kondisi tersebut menyebabkan risiko kelelahan fisik dan psikologis. Di sisi lain, sektor berisiko tinggi seperti penerbangan telah menerapkan FRMS

melalui Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) Part 121 Tahun 2015. Yulyanti et al. (2021) melaporkan bahwa sekitar 13% kecelakaan kerja berkaitan dengan faktor kelelahan. Penerapan FRMS mampu mengurangi insiden berbasis kelelahan melalui pengaturan jam kerja dan waktu istirahat yang lebih teratur (ICAO, 2020). Hingga saat ini Basarnas belum memiliki kebijakan FRMS yang mengatur rotasi personel pasca operasi maupun *fatigue assessment*.

3. Budaya Organisasi Belum Sensitif terhadap Kesehatan Mental

Budaya *rescuer* harus selalu tangguh secara fisik dan mental masih dominan dalam lingkungan kerja SAR. Kondisi ini menyebabkan sebagian personel enggan melaporkan masalah psikologis yang dialaminya, karena takut berpengaruh pada produktivitas mereka, disisi lain Basarnas telah memiliki kebijakan pemeliharaan kesehatan tenaga SAR dan SOP pemeliharaan kesehatan namun Nur (2026) selaku psikolog Basarnas berpendapat bahwa efektivitas implementasinya kebijakan belum optimal karena sangat bergantung pada keterbukaan personel dan

kesediaan mengakses layanan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan belum kuatnya budaya *psychological safety*. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang membangun budaya *psychological safety* memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko psikososial (OECD, 2020; Edmondson & Mahoney, 2019).

4. Belum Tersedia Sistem Monitoring Wellbeing Rescuer yang Terstruktur dan Berkelanjutan

Meskipun Basarnas memiliki program skrining kesehatan jiwa dan layanan konseling, hasilnya belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk kesiapan operasi SAR. Hapsari et al. (2025) merekomendasikan penguatan skrining, monitoring, dan evaluasi kesehatan mental secara berkelanjutan terhadap 375 *rescuer* di 10 Kantor SAR. Dengan sistem monitoring *wellbeing rescuer* akan memantau kondisi mental *rescuer*, mengukur indeks kesehatan mental, dan sistem peringatan dini berbasis data sebagai pendukung pengambilan keputusan organisasi.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Optimalisasi Implementasi Juknis Pemeliharaan Kesehatan Tenaga SAR

Basarnas melalui Direktorat Bina Tenaga dan Biro Kepegawaian memperluas Juknis Nomor 2 Tahun 2026 dengan SOP pasca insiden kritis untuk melakukan

Critical Incident Stress Debriefing (CISD) pasca operasi dengan korban massal atau bencana nasional dilaksanakan oleh psikolog bersama tim khusus. Kemudian personel yang terpapar kondisi psikologis kritis dirujuk ke rumah sakit jiwa mitra. Pendekatan ini sejalan dengan praktik dukungan psikologis pada *first responder* diberbagai layanan darurat dan membantu pemulihan personel.



Alternatif 2: Fatigue Risk Management System (FRMS)

Kedeputan Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas menerbitkan kebijakan

FRMS yang mengatur rotasi personel, jam siaga, *recovery period*, dan *fatigue assessment*. Kepala Kantor SAR dan/atau Pemerintah Daerah menjalankan kebijakan tersebut lalu tim medis memvalidasi status pulih personel. Kebijakan ini dapat mengacu pada pengelolaan *fatigue* di penerbangan sipil melalui FRMS ICAO, lalu disesuaikan pada pola operasi SAR. Kebijakan ini dapat menurunkan *human error* dan mencegah personel bertugas dalam kondisi belum pulih.



Alternatif 3: Psychological Safety dan Budaya Organisasi Peduli Kesehatan Mental

Kepala Basarnas mengeluarkan surat edaran resmi yang menyatakan komitmen organisasi terhadap *psychological safety*,



diikuti pelatihan *Mental Health Awareness* bagi seluruh Kepala Kantor dan komandan operasi. Seluruh personil melakukan *Psychological Safety Briefing* rutin sebelum dan sesudah operasi

panjang. Psikolog memimpin kampanye anti-stigma bertema psikologis mental *rescuer*, dengan mengacu pada praktik Palang Merah Indonesia atau *National Fire Chiefs Council Health and Wellbeing Framework (NFCC)*. Kebijakan ini diharapkan mengurangi *under-reporting* sehingga dapat mencegah akumulasi masalah psikologis yang tidak terdeteksi pada diri *rescuer*.

Alternatif 4: Sistem Monitoring Wellbeing Rescuer Berbasis Data

Pusdatin, Direktorat Operasi, dan Direktorat Kesiapsiagaan Basarnas membangun sistem monitoring sebagai fondasi



pengambilan keputusan berbasis data yang mengintegrasikan hasil skrining jiwa, beban tugas, durasi operasi, dan hasil konseling dari seluruh Kantor SAR secara berkala. Psikolog mengisi dan menafsirkan data; sistem menghasilkan Indeks Kesehatan Mental Rescuer (IKMR) yang ditetapkan sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) organisasi. Model ini mengacu pada *NFCC Health and Wellbeing Framework* dan *Military Health Outcomes Program (MilHOP)*. Dengan sistem ini dapat mendeteksi risiko psikologis sejak dini, dapat melihat tren beban mental, menentukan personel yang perlu konseling atau pengurangan tugas untuk keputusan penugasan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kriteria	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4
Efektivitas	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Biaya	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kecepatan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Dampak Perubahan Budaya	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi

Rekomendasi terpilih (Alt.4) : Sistem *Monitoring Wellbeing Rescuer* Berbasis Data dengan penerapan sebagai berikut :

Jangka Pendek

- Membentuk *Peer Support Team* : Tim dukungan psikologis antar *rescuer* dan keluarga sebagai bagian integral *safety culture*
- Integrasi Manajemen Risiko Kelelahan dalam sistem operasi SAR

Jangka Menengah

- Pengembangan Indeks Kesehatan Mental *Rescuer* (IKMR) sebagai alat ukur psikologis *rescuer* secara berkala
- Penetapan target kesehatan mental menjadi KPI organisasi.

Jangka Panjang

Transformasi Basarnas menuju *Psychological Safe Organization* melalui:

- Pembangunan Sistem *Monitoring Wellbeing Rescuer*
- Kampanye *Mental Health Awareness* sebagai *Safety Culture* di lingkungan organisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Brooks, S. K., Dunn, R., Amlôt, R., Rubin, G. J., & Greenberg, N. (2016). A systematic review of mental health outcomes in emergency responders. International Civil Aviation Organization. (2020). Search and rescue manual (Doc 9731-AN/958, 4th ed.). ICAO.
- Setiawan, A., et al. (2024). Penilaian risiko kesehatan mental *rescuer* dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana.